

**MEMBANGUN KEMBALI NAMA BAIK: STRATEGI NARATIF
NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
DALAM MENGHADAPI STIGMA SOSIAL**



Oleh:

YOVI KURNIASARI

NIM: 23200012056

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-04/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Membangun Kembali Nama Baik: Strategi Naratif Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam Menghadapi Stigma Sosial

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOVI KURNIASARI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23200012056
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 695f2e3f77266

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Akmal Ihsan
SIGNED



Valid ID: 695f1fd4f23af

Penguji II

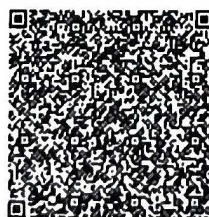
Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 695f29876f12c

Penguji III

Prof. Zulkipli Lessy,
S.Ag., S.Pd., BSW, M.Ag., MSW., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6966f8897e990

Yogyakarta, 23 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovi Kurniasari
Nim : 23200012056
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Yovi Kurniasari

NIM. 23200012056

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovi Kurniasari
Nim : 23200012056
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Yovi Kurniasari

NIM. 23200012056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan juga koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

MEMBANGUN KEMBALI NAMA BAIK: STRATEGI NARATIF
NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
DALAM MENGHADAPI STIGMA SOSIAL

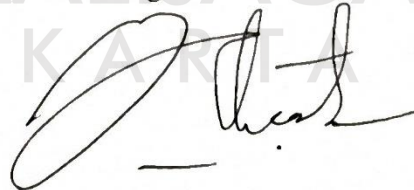
Yang ditulis oleh:

Nama : Yovi Kurniasari, S.Sos.
NIM : 23200012056
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2025
Pembimbing



Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph. D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan kepada:

1. Saya panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga saya dapat menempuh pendidikan pada jenjang Magister.
2. Kepada Orang tua saya tercinta, Mamak dan Bapak yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, serta kasih sayang tanpa batas. Terimakasih atas setiap dukungan dan doa yang terus mengiri langkah saya.
3. Kepada diri saya yang tidak menyerah, yang terus belajar, bangkit setiap kali jatuh, dan yang berani melangkah meskipun jalan sering terasa berat. Semoga karya ini menjadi pengingat bahwa segala upaya, ketekunan, dan kesabaran yang telah dijalani tidak pernah sia-sia.
4. Almamater tercinta, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial, yang telah menjadi ruang belajar, bertumbuh, dan mewujudkan mimpi. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh dosen, staf, serta teman-teman seperjuangan.

MOTTO

“Terkadang jalan berliku justru menjadi cara Tuhan menuntun kita menuju tujuan terbaik”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Salam, yang dengan diutusnya beliau sebagai Rasul telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih beradab.

Penulisan tesis berjudul: Membangun Kembali Nama Baik: Strategi Naratif Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam Menghadapi Stigma Sosial telah mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan, dedikasi, serta komitmen beliau dalam memajukan dunia pendidikan, yang turut memberikan inspirasi dalam penyelesaian karya ini.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur. Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Najib Kailani, S. Fil.I., MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Lathiful khuluq, M.A., BSW., Ph.D., selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala perhatian, waktu, bimbingan, dan arahan yang diberikan sejak awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
5. Ibu Ro'fah, Ma., Ph.D. dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I. selaku dosen mata

kuliah seminar proposal, terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan motivasi yang telah diberikan.

6. Terimakasih kepada Bapak Prof. Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., BWS, M.Ag., MSW., Ph.D, Bapak DR Akmal Ihsan, dan Bapak Drs. Lathiful khuluq, M.A., BSW., Ph.D., yang telah mendampingi proses pengujian dengan penuh kesabaran, memberikan arahan serta masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini, serta menciptakan suasana sidang yang kondusif dan tidak menegangkan.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen *Interdisciplinary Islamic Studies* khususnya kepada dosen konsentrasi Pekerjaan Sosial, atas ilmu, perhatian, dan dorongan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada Guru-guru tercinta atas doa, semangat, dan perhatian yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang S2.
9. Kepada Bapak dan Ibu staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, serta kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung. Dukungan dan keterbukaan dari seluruh pihak Lapas sangat membantu penulis dalam memperoleh data serta memahami situasi lapangan dengan lebih mendalam. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah tercinta, Bapak Solihin, dan Ibu tersayang, Ibu Sumiarsih. Terima kasih atas

segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan sejak awal hingga saat ini. Setiap langkah dan pencapaian penulis tidak lepas dari keikhlasan dan kasih tulus Ayah dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu sebagai balasan atas segala kebaikan cinta yang telah diberikan.

11. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kakak tercinta, Rahayu Kurniasih, S.Sos.I atas segala dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih pula kepada keponakan tersayang, Faruq dan Aqmar, yang selalu menghadirkan keceriaan dan menjadi sumber motivasi tersendiri bagi penulis. Doa dan kasih sayang dari kalian semua menjadi kekuatan yang berharga dalam menyelesaikan karya ini.
12. Kepada sahabatku tersayang, Mariana Libra Rambe, Alfi Firkhannisa dan Riris Indah, terima kasih atas perhatian, doa, serta kebersamaan yang tulus selama ini. Kalian selalu hadir memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, dan menemani dalam setiap proses perjuangan. Dukungan dan kehangatan persahabatan kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penyusunan tesis ini. Semoga persahabatan kita terjalin indah dan abadi dalam kebaikan.
13. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pakde Tanto dan Bude Sri, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan sepanjang perjalanan ini. Setiap bentuk kepedulian dan motivasi dari keluarga

menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan untuk seluruh keluarga.

14. Terima kasih kepada Rizkia Aulia Pradita, S.Sos, teman seperjuangan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas kerja sama, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan selama proses bimbingan dengan dosen yang sama serta pelaksanaan penelitian di tempat yang sama. Kebersamaan dalam menghadapi tantangan, saling berbagi ilmu, dan memberi motivasi satu sama lain menjadi pengalaman berharga yang tidak terlupakan. Semoga perjuangan ini membawa keberkahan dan kesuksesan bagi kita berdua di masa yang akan datang.

15. Kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Terakhir, penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau setidaknya menjadi tambahan wawasan bagi para pembaca, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai narapidana kasus korupsi. Penulis menyadari bahwa karya ini memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun redaksi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Penulis

Yovi Kurniasari, S.Sos.

ABSTRAK

Yovi Kurniasari, S. Sos. (23200012056), Mengembalikan Nama Baik: Strategi Naratif Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta: Program Study Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus korupsi di Indonesia yang menimbulkan stigma sosial kuat terhadap pelakunya. Stigma tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika resiliensi narapidana kasus korupsi selama menjalani masa pidana serta bagaimana mereka membangun strategi naratif untuk memulihkan nama baik dan identitas diri di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Subjek penelitian terdiri dari tiga warga binaan kasus korupsi yang dipilih melalui teknik purposif sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pengalaman dan makna yang dibangun oleh informan selama menjalani hukuman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase awal pemenjaraan, narapidana mengalami perasaan malu, penyesalan, dan kehilangan kepercayaan diri sebagai bentuk respons *flight*. Seiring berjalannya waktu, informan menunjukkan respons *fight* yang adaptif melalui keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, aktivitas produktif seperti menulis, serta kontribusi sosial di lingkungan Lapas. Strategi naratif yang dibangun mencerminkan proses rekonstruksi identitas dan pemulihan moral yang didukung oleh kesadaran spiritual, dukungan keluarga, serta hubungan positif dengan sesama warga binaan dan petugas Lapas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi naratif berperan penting dalam membantu narapidana korupsi menghadapi stigma sosial dan memulihkan makna diri. Melalui narasi penyesalan dan produktivitas, narapidana berupaya membangun kembali citra diri yang lebih positif dan bermakna meskipun berada dalam keterbatasan ruang sosial.

Kata kunci: Narapidana Korupsi, Strategi Naratif, Resiliensi, *Fight or Flight*, Stigma Sosial

DAFTAR ISI

COVER TESIS	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
NOTADINAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritis	21
1. Teori Pertarungan atau Pelarian (<i>Fight or Flight Theory</i>)	22
2. Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Identitas Narapidana Korupsi	23
3. Konsep Resilensi	24
4. Strategi Naratif sebagai Wujud Pertarungan, Pelarian, dan Resiliensi	24
5. Integrasi Teori <i>Fight or Flight</i> dengan Konsep Resiliensi.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA.....	36
A. Sejarah Lembaga	38
B. Letak Geografis	40

C. Visi dan Misi Lembaga	42
D. Tujuan Lembaga dan Fungsi Lembaga	43
E. Struktur Lembaga	45
F. Sarana dan Prasarana	47
G. Kepegawaian	51
H. Pendanaan	53
I. Pembinaan Perilaku	53
J. Karakteristik Warga Binaan	60
K. Data Informan Warga Binaan Kasus Korupsi	65
BAB III DIMANIKA RESILIENSI YANG DIALAMI NARAPIDANA KASUS KORUPSI SELAMA MENJALANI MASA HUKUMAN DI LAPAS	67
A. Gambaran Umum Dinamika Kehidupan Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta	68
B. Identitas Informan dan Fase Awal Penyesuaian Diri di Lapas	70
1. Profil Warga Binaan “VA”	70
2. Profil Warga Binaan “SW”	75
3. Profil Warga Binaan “MT”	79
C. Analisis Dinamika Resiliensi	82
BAB IV NARASI DIRI NARAPIDANA KORUPSI DALAM MENGHADAPI STIGMA SOSIAL DAN PEMULIHAN NAMA BAIK	88
A. Bentuk-bentuk Strategi Naratif	89
1. Penyesalan dan Pertanggungjawaban Moral	90
2. Spiritualitas dan Kekuatan Batin	93
3. Produktivitas dan Kontribusi Positif	94
B. Strategi Naratif Sebagai Respon Terhadap Stigma Sosial	95
1. Makna Stigma Bagi Narapidana Korupsi	96
2. Peralihan dari <i>Flight</i> ke <i>Fight</i>	98
C. Faktor-faktor yang Mendukung Pembentukan Strategi Naratif	103
1. Dukungan Keluarga dan Lingkungan Sosial	104
2. Kegiatan pembinaan narapidana kasus korupsi	108

3. Relasi Positif dengan Sesama Warga Binaan dan Petugas Lapas	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KPLP LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA.....	121
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KASI BIMASWAT LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	122
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN INTI	124
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN.....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Integrasi Teori Fight Or Flight dengan Resiliensi	26
Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin	51
Tabel 2.2 Data pegawai menurut golongan ASN	51
Tabel 2.3 Data Informan Tindak Pidana Korupsi	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	38
Gambar 2.2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	39
Gambar 2.3	Denah lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta ...	41
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Yogyakarta	45
Gambar 2.5	Poliklinik Lapas Kelas IIA Yogyakarta	49
Gambar 2.6	Perpustakaan Lapas Kelas IIA Yogyakarta	50
Gambar 2.7	Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta	50
Gambar 2.8	Data Pegawai Menurut Pendidikan	52
Gambar 2.9	Data Pegawai Menurut Agama.....	53
Gambar 2.10	Kegiatan Pembinaan Agama Islam	56
Gambar 2.11	Kegiatan Pembinaan Agama Nasrani	57
Gambar 2. 12	Kegiatan Upacara hari Nasional	57
Gambar 2.13	Aktivitas Pembelajaran.....	58
Gambar 2.14	Kegiatan Olahraga	59
Gambar 2.15	Bakat Warga Binaan dalam Hal Kesenian	59
Gambar 2.16	Keterampilan Warga Binaan Membuat Bakpia.....	60

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, narapidana tindak pidana korupsi tidak hanya menjalani hukuman pidana, tetapi juga menghadapi konsekuensi sosial dan psikologis yang berat. Pemenjaraan akibat korupsi sering kali diikuti dengan hilangnya status sosial, rusaknya reputasi, serta menurunnya kepercayaan publik yang sebelumnya melekat pada diri pelaku, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan pejabat atau tokoh masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan tekanan psikologis berupa rasa malu, penyesalan, stress, hingga krisis identitas diri. Selain itu, stigma sebagai pelaku kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) membuat narapidana korupsi rentan mengalami penolakan sosial, baik selama menjalani masa pidana maupun setelahnya, sehingga proses adaptasi dan pemulihan diri menjadi semakin kompleks dan membutuhkan strategi khusus untuk membangun kembali makna hidup serta nama baik ditengah masyarakat..¹

Dalam konteks Indonesia, fenomena korupsi telah menjadi realitas yang terus-menerus menyeruak ke permukaan publik melalui berbagai saluran informasi, mulai dari media tertulis hingga digital. Pemberitaan tentang skandal korupsi hampir selalu hadir setiap harinya tanpa jeda. Kejahatan korupsi memiliki dampak

¹ Muhammad Fadhli dan Subandi, *Perubahan Makna Hidup Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan X*, Jurnal Psikologi, Vol. 3, No. 2, 2020.

sangat destruktif terhadap perekonomian negara, sehingga penanganannya mesti dilakukan dengan penuh ketegasan melalui jalur hukum. Hal ini sejalan dengan amanat UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 dengan penegasan Indonesia dikategorikan sebagai negara berlandas hukum. Konsekuensinya, keseluruhan bentuk perbuatan atau pelanggaran yang menciderai kepentingan bangsa dan rakyat wajib ditindak secara berkeadilan guna mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera dan adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta konstitusi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kejahatan korupsi bukan sekadar merampas aset negara, melainkan juga merampas hak sosial-ekonomi rakyat dalam skala masif.²

Beberapa faktor pendorong seseorang terlibat dalam praktik korupsi meliputi: pertama, minimnya penguatan nilai keagamaan, moralitas, serta etika; kedua, ketiadaan sanksi tegas yang membuat jera bagi para pelaku; ketiga, absennya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel (good governance); keempat, dorongan kebutuhan ekonomi; kelima, lemahnya sistem manajemen dan pengawasan yang tidak optimal serta efisien; dan keenam, dampak modernisasi yang menggeser tatanan nilai sosial di tengah masyarakat.³

Pada konferensi pers terkait laporan pencapaian kinerja KPK periode 2019-2024 yang berlangsung di Jakarta, Selasa 17 Desember 2024, Alexander Marwata menjelaskan bahwa sebagai bagian dari strategi trisula pemberantasan korupsi,

² Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. II, No. 2, 2016, hlm. 7.

³ A. Syamsuddin, *Tindak pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.11.

KPK menjalankan serangkaian langkah penegakan hukum untuk menciptakan efek preventif bagi para pelaku kejahatan korupsi. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, KPK telah memproses 2.730 kasus di lima bidang prioritas pemberantasan korupsi. Kelima bidang tersebut dipaparkan secara terperinci oleh Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Dari aspek kuantitatif, terdapat stabilitas dalam jumlah penanganan kasus selama periode tersebut. Dalam rentang waktu lima tahun, KPK mencatat telah menggarap 541 kasus pada tahap penyelidikan, 622 kasus dalam tahap penyidikan, 510 kasus yang dilimpahkan ke penuntutan, 533 kasus dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta melaksanakan eksekusi terhadap 524 perkara.⁴

Sanksi hukuman merupakan respons yang dikenakan kepada individu yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum. Tanpa adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran, kondisi ini justru akan menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat yang taat hukum.⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu jenis pemidanaan utama yang tercantum dalam KUHP adalah hukuman penjara, dan individu yang menjalaninya disebut narapidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berkorelasi erat dengan sanksi penjara, memberikan definisi narapidana pada Pasal 1 Ayat 7. Bunyi pasal tersebut adalah: "Narapidana merupakan Terpidana yang menjalani sanksi hilang kemerdekaan di Lapas." Berdasarkan ketentuan tersebut, narapidana adalah individu terpidana yang menjalani hukuman berupa pengekangan kebebasan dan ditempatkan di Lembaga

⁴ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama> diakses Tanggal 5 Januari 2025.

⁵ Putri, Delia. *"Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru."* (2022).

Pemasyarakatan atau yang lazim disebut Lapas. Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan tahap final dalam rangkaian sistem peradilan pidana, di mana sistem tersebut terdiri dari empat sub-sistem: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai tahap akhir proses peradilan, Lembaga Pemasyarakatan kerap difungsikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, khususnya mereka yang kehilangan kebebasannya.⁶

Menjadi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) adalah pengalaman hidup yang sulit dilupakan. Kehidupan di balik jeruji merupakan masa penuh tekanan yang melebihi berbagai peristiwa negatif lainnya karena kombinasi privasi personal dan kondisi lingkungan yang tidak nyaman, penuh ketakutan, dan kekhawatiran. Identitas dan pola kehidupan seseorang akan mengalami transformasi drastis ketika menjadi warga binaan, disebabkan oleh segregasi antara kehidupan saat ini dengan masa lalu, seperti hilangnya keleluasaan bepergian dan berkumpul bersama keluarga. Kondisi ini memunculkan perasaan terasing dari masyarakat dan memerlukan periode adaptasi yang panjang, serta berakibat pada menurunnya kepercayaan diri dan harga diri, memicu kecemasan, stres, bahkan ada yang berakhir pada tindakan bunuh diri.⁷

Seorang warga binaan yang tengah menjalani masa tahanan selalu berharap segera dapat merasakan kebebasan kembali. Setelah menuntaskan masa hukuman yang diputuskan majelis hakim sesuai durasi yang ditetapkan, warga binaan akan dikembalikan ke tengah masyarakat, bersatu kembali dengan keluarga, serta dapat

⁶ Ibid.

⁷ <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/download/1233/752/> diakses Tanggal 5 Januari 2025.

berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun, menyandang status mantan narapidana menjadi beban mental tersendiri bagi mereka. Hal ini terjadi karena stigma negatif dari masyarakat yang membuat mantan warga binaan harus beradaptasi ulang dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan sosial. Ironinya, hanya sedikit masyarakat yang peduli atau menerima kehadiran mantan warga binaan dalam interaksi sosial⁸. Cap buruk ini tidak hanya berasal dari masyarakat luas, tetapi juga dari media massa, lingkungan pergaulan, bahkan sesama rekan. Dampaknya, narapidana korupsi sering dipandang sebagai representasi kegagalan integritas, dan reputasi mereka hancur di hadapan publik. Stigma negatif terhadap mantan warga binaan timbul karena banyak narapidana yang mengulang perbuatan serupa seperti sebelumnya, sehingga masyarakat umumnya memandang mereka dengan sebelah mata dan penuh prasangka. Selain pandangan buruk dari masyarakat, mantan narapidana juga mengalami rasa rendah diri dan hambatan psikologis untuk kembali terjun ke tengah masyarakat setelah bebas dari tahanan. Dengan stigma yang berkembang di lingkungan sosial, mantan narapidana yang berusaha menyesuaikan diri justru dianggap sebagai sumber masalah sehingga mayoritas orang melakukan penolakan dan diskriminasi terhadap mereka. Masyarakat cenderung menafsirkan setiap perilaku dan aktivitas keseharian mantan narapidana yang telah bebas dari sudut pandang negatif, sehingga mereka merasa terpinggirkan atau teralienasi dari komunitas. Mantan narapidana menghadapi kesulitan besar untuk meraih kembali kepercayaan—

⁸ Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina, dkk, Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

bahkan yang paling kecil sekalipun dari masyarakat sekitar, serta kesulitan memperoleh pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarga.⁹ Dalam konteks ini, sebagian dari mereka mencoba untuk membangun kembali citra diri melalui berbagai cara, termasuk melalui strategi naratif yakni dengan menyusun dan menyampaikan cerita tentang diri mereka sendiri, tindakan masa lalu, dan harapan masa depan.

Konsep pemasyarakatan menggaris bawahi signifikansi kontribusi masyarakat dalam rangkaian pembinaan terhadap narapidana. Proses pembinaan ini merupakan elemen integral yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan penegakan hukum. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mentransformasi warga binaan menjadi individu yang utuh secara manusiawi, memiliki kesadaran akan pelanggaran yang telah dilakukan, melakukan perbaikan diri, serta berkomitmen untuk tidak mengulang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mereka dapat kembali diterima dalam komunitas sosial, berkontribusi aktif dalam proses pembangunan, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang berkualitas dan penuh tanggung jawab. Selain itu, sistem ini bertugas mempersiapkan warga binaan agar mampu melakukan integrasi yang positif ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat kembali menjalankan peran sebagai bagian dari komunitas dengan status bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sebagai instrumen pelaksanaan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep keadilan restoratif ini merupakan pendekatan yang diterapkan kepada pelanggar hukum dengan fokus

⁹ Ibid.

pada pemulihan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban, keluarga korban, serta komunitas masyarakat secara luas. Rehabilitasi reputasi dan kemampuan untuk melakukan reintegrasi sosial menjadi sasaran primer dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Orientasi ini sejalan dengan fungsi lapas dalam beberapa aspek, yakni menyelenggarakan pembinaan yang humanis supaya narapidana menyadari perbuatan salahnya, tidak mengulang kesalahan serupa, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh tanggung jawab, serta menjadi individu yang memberikan manfaat dan berkontribusi aktif dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan secara sinergis antara pembina, narapidana, dan masyarakat.¹⁰

Untuk merealisasikan target pembinaan di lembaga pemasyarakatan, warga binaan memperoleh berbagai program pelatihan keterampilan, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial sebagai bentuk intervensi pembinaan agar mereka dapat kembali dan produktif di tengah masyarakat. Akan tetapi, dalam perjalanan proses pembinaan tersebut tidak jarang terjadi konflik atau hambatan yang dialami, baik yang bersumber dari faktor internal individu maupun faktor eksternal lingkungan. Akibatnya, pengalaman menjalani masa hukuman di penjara kerap dipersepsikan sebagai penderitaan karena harus menghadapi kehidupan yang dibatasi oleh berbagai regulasi ketat maupun keterbatasan fasilitas yang tersedia..¹¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, yang berlokasi di Wirogunan, Kota Yogyakarta merupakan salah satu fasilitas pemasyarakatan di

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

¹¹ Ibid.

bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Lapas ini memiliki peran penting dalam membina warga binaan melalui pendekatan holistik yang mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan dengan memberikan pelatihan spritual, pendidikan formal, dan kegiatan sosial. Program-program ini bertujuan untuk membentuk sikap yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup narapidana selama masa tahanan. Selain pembinaan kepribadian, lapas juga melakukan pelatihan keterampilan kerja, seperti pembuatan kerajinan, pengelolaan sampah, dan pelatihan teknis lainnya.¹² Lapas kelas IIA Yogyakarta mempersiapkan warga binaan agar mampu mandiri setelah kembali ke masyarakat. Lapas kelas IIA Yogyakarta juga menyediakan layanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan warga binaan, serta memfasilitasi kunjungan keluarga, baik secara langsung maupun daring, guna menjaga hubungan sosial warga binaan dengan lingkungan luar.¹³ Terdapat 30 orang yang terjerat kasus tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.¹⁴ Keberadaan mereka mencerminkan bahwa isu korupsi tidak hanya berdampak sistemik di ranah publik, tetapi juga memiliki dimensi personal yang kompleks, terutama para pelakunya harus menghadapi stigma dan membangun ulang citra diri di dalam penjara.

Individu yang melakukan korupsi akan terlekat label sebagai seorang yang jahat. Individu tersebut juga akan mendapatkan citra yang buruk atas segala citra yang ia bangun di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya citra yang hilang dan

¹² Wawancara dengan Bapak Arvian petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2025.

¹³ Wawancara dengan Bapak Arvian petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Taufan sebagai KPLP Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2025.

telah dibangun di mata publik, perasaan malu juga akan muncul karena menjadi pemberitaan di berbagai media masa. Individu tidak bisa menuruti semua keinginannya secara mandiri, namun harus berlandaskan konsekuensi bahwa tindakan yang mereka lakukan berasosiasi pada kehidupan pribadi dan citranya di dalam masyarakat. Sehingga semua perilaku yang dilakukan sejatinya menghindari perasaan malu dan juga penghakiman dari tempat mereka berada.

Dalam konteks narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan, resiliensi berperan penting dalam membantu mereka menghadapi tekanan psikologis, stigma sosial, dan proses rehabilitasi menuju reintegrasi ke masyarakat.

Resiliensi merupakan ketahanan yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi kondisi yang sedang dialami. Resiliensi juga dapat diartikan sebagai kekuatan untuk menghadapi pengalaman resiko keadaan, menghadapi kesulitan, dan penerimaan yang baik terhadap faktor resiko tersebut.¹⁵ Resiliensi dapat ditunjukkan dengan adanya rasa penerimaan dan percaya diri dalam kondisi yang sedang dihadapi, serta mampu untuk melanjutkan hidupnya. Keadaan resilien sebenarnya dapat didukung oleh berbagai faktor, seperti kekuatan didalam individu, apa yang dapat dilakukan, dan faktor dukungan sosial yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan.¹⁶ Dalam konteks narapidana korupsi, resiliensi menjadi aspek penting dalam proses adaptasi mereka terhadap

¹⁵ Michael Rutter, “*Resilience as a Dynamic Concept*”, *Development and Psychology* 24, No. 2 (2012): 335-44, <https://doi.org/10.1017/S0954579412000028>.

¹⁶ Raisa dan Annastasia Ediati, “Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang,” *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 537–542.

lingkungan penjara serta dalam menghadapi stigma sosial yang melekat. Meskipun mereka berada dalam situasi yang penuh tekanan, tidak semua individu menunjukkan respons yang sama. Ada diantara mereka yang mampu membangun kembali makna hidup, menjaga harga diri, dan bahkan menyusun narasi positif tentang masa depan mereka.

Resiliensi dapat ditunjukkan dengan adanya rasa penerimaan dan percaya diri dalam kondisi yang sedang dihadapi, serta mampu untuk melanjutkan hidupnya. Keadaan resilien sebenarnya dapat didukung oleh berbagai faktor, seperti kekuatan di dalam individu, apa yang dapat dilakukan, dan faktor dukungan sosial yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan.¹⁷

Dalam konteks warga binaan pemasyarakatan kasus korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta, resiliensi menjadi aspek penting dalam proses adaptasi terhadap kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Warga binaan dengan latar belakang status sosial dan ekonomi yang tinggi sebelum menjalani masa hukuman, sering kali menghadapi tekanan psikologis yang besar, seperti rasa malu, kehilangan status, hingga keterputusan relasi sosial. Namun, resiliensi dapat muncul melalui proses penerimaan atas konsekuensi hukum, kemampuan menjaga harga diri, serta memanfaatkan waktu pembinaan untuk refleksi dan perbaikan diri. Program-program pembinaan kepribadian, keagamaan, dan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di lapas turut mendukung tumbuhnya resiliensi, terutama ketika warga binaan merasa tetap memiliki harapan dan peran yang berarti, baik bagi diri

¹⁷ Raisa dan Annastasia Ediati, Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang, *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 537-542.

sendiri maupun bagi masyarakat setelah bebas nanti.

Penelitian ini berfokus pada aspek yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana dinamika resiliensi yang dialami narapidana kasus korupsi selama menjalani masa hukuman dan bagaimana narapidana korupsi secara aktif membangun narasi tentang diri mereka untuk memulihkan identitas dan nama baik di tengah tekanan sosial dibalik jeruji tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Membangun Kembali Nama Baik: Strategi Naratif Narapidana Korupsi di Lapas Kelas II A Yogyakarta Dalam Menghadapi Stigma Sosial”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam untuk memahami perjalanan atau proses perubahan yang terjadi dalam diri narapidana baik secara mental, emosional, maupun sosial dalam upaya mereka untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri selama masa hukuman serta konstruksi narasi yang digunakan oleh para narapidana dalam merespon stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, permasalahan tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika resiliensi yang dialami narapidana kasus korupsi selama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Yogyakarta?
2. Bagaimana narapidana korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta membangun strategi naratif untuk memulihkan nama baik dan identitas diri mereka?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana narapidana kasus korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta untuk memahami pengalaman dan proses bertahan narapidana kasus korupsi dalam mengembangkan resiliensi selama berada di Lapas serta membangun strategi naratif dalam upaya memulihkan nama baik dan identitas diri mereka. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin mengekspresikan proses para narapidana dalam merefleksikan pengalaman masa lalu mereka, menyusun ulang cerita hidup, serta membongkar kembali peran dan citra diri di tengah situasi penuh tekanan dan stigma sosial.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari riset ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam ranah teori maupaun praktikal:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang ilmu sosial, khususnya terkait studi tentang resiliensi narapidana korupsi dan narasi identitas dan stigma sosial dalam konteks pemasyarakatan. Dengan menyoroti strategi naratif yang digunakan oleh narapidana korupsi, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan perspektif baru mengenai bagaimana identitas sosial dibentuk, dinegosiasikan, dan dipulihkan dalam ruang-ruang tertutup seperti lembaga pemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak

lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam merancang program pembinaan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum dan perilaku, tetapi juga pada aspek psikososial dan identitas diri narapidana. selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan program-program pembinaan berbasis refleksi diri, seperti penulisan naratif, konseling identitas, atau forum berbagi pengalaman yang dapat mendukung proses resosialisasi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bermanfaat bagi keluarga narapidana dan masyarakat luas dalam membangun sudut pandang yang lebih konstruktif terhadap mantan narapidana, dengan menekankan pentingnya memberi ruang bagi perubahan dan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam upaya menurunkan resistensi terhadap mantan narapidana dan membuka jalan bagi reintegrasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencegah plagiasi, perlu dilakukan telaah pustaka guna mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini. Melalui telaah tersebut, dapat diketahui perbedaan yang jelas antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu. Berdasarkan hasil telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini. Berikut adalah literatur yang membahas isu terkait dalam penelitian ini:

Pertama, artikel oleh Samuel Tatawi, “Pemulihan Nama Baik Berupa Ganti Rugi Kepada Pejabat Negara Tersangka Tipikor Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001”. Artikel ini membahas tentang mekanisme pemulihan nama baik bagi

pejabat negara yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks ketika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Penelitian ini menelaah dasar hukum, prosedur, dan implementasi dari pemulihan hak-hak tersangka yang telah dirugikan secara moral, sosial, maupun politis akibat status hukumnya. Selain itu, dibahas pula permasalahan yuridis dan praktik dalam pemberian ganti rugi serta pemulihan nama baik, termasuk hambatan yang sering dihadapi, seperti stigma masyarakat, kerugian institusional, serta minimnya pengaturan teknis mengenai rehabilitasi pasca proses hukum.¹⁸

Kedua, artikel oleh Wanda Fristian, dkk, "Upaya Penyesuaian Diri Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang". Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana mantan narapidana di Kecamatan Klakah, Lumajang, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang masih memberikan stigma negatif terhadap mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan narapidana menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyesuaian diri, termasuk perasaan malu, takut, dan rendah diri akibat label negatif yang diberikan oleh masyarakat.

Ketiga, artikel oleh Ahmad Shobrianto, dkk, "Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Kasus Fenomenologi Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri)". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri mantan narapidana terbentuk melalui proses refleksi diri yang mendalam,

¹⁸ Samuel Tatawi, *Pemulihan Nama Baik Berupa Ganti Rugi Kepada Pejabat Negara Tersangka Tipikor Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001*, Lex Privatum Vol.V, Agustus 2017.

terutama serelah mereka mengalami masa pembinaan. Para mantan narapidana menunjukkan penyesalan dan komitmen kuat untuk tidak mengulangi kesalahan, dan proses ini diperkuat oleh dukungan sosial dari keluarga serta lingkungan sekitar.¹⁹

Keempat, artikel oleh Arjun, dkk, “*Tinjauan Turidis Terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan prosedur pelaksanaan pemulihan nama baik bagi terdakwa yang dinyatakan bebas. Penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi secara efektif untuk memastikan bahwa terdakwa yang dinyatakan bebas dapat mengembalikan nama baiknya yang telah tercemar akibat proses hukum. Meskipun pemulihan tersebut tidak sepenuhnya dapat menghapus stigma yang ada, pemberian rehabilitasi merupakan langkah penting dalam menjamin hak dan keadilan bagi individu yang terbukti bersalah.²⁰

Kelima, artikel oleh Jekson Kipli Lumban, dkk, “*Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”. Artikel ini membahas tentang kasus pencemaran nama baik di era digital, khususnya melalui media sosial, yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital dan pemahaman etika bermedia sosial dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik

¹⁹ Ahmad Shobrianto, *Proses Konsep Diri Mantan Narapidana (Studi Fenomenologi Anggota Komunitas Dedikasi Mantan Narapidana Untuk Negeri)*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 2 Tahun 2023.

²⁰ Arjun, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dkk, *Tinjauan Turidis Terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 7 Tahun 2023.

serta upaya rehabilitasi bagi korban. Upaya rehabilitasi dapat dilakukan melalui permintaan maaf terbuka, pencabutan pernyataan yang mencemarkan, klarifikasi melalui media yang sama, serta penghapusan konten yang merugikan di platform digital.²¹

Keenam, artikel oleh Eliza Della Kanaya, “*Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh Desk Collector Fintech P2P Lending Ilegal Di Indonesia*”. Artikel ini membahas perlunya pembaruan kebijakan hukum di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban pencemaran nama baik, khususnya yang terjadi dalam praktik penagihan utang oleh *desk collector* dari perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal. Meskipun hukum pidana dan perdata di Indonesia mengatur pencemaran nama baik, mekanisme pemulihan bagi korban masih terbatas dan seringkali memerlukan proses hukum yang panjang dan kompleks.²²

Ketujuh, asrtikel oleh Muhammad Fadhli, dkk, “*Perubahan Makna Hidup Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan X*”. Penelitian ini mengeksplorasi perubahan makna hidup pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya mantan kepala desa, selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan X. Perubahan tersebut meliputi peningkatan rasa syukur, religiusitas, komitmen terhadap perbaikan diri,

²¹ Jekson Kipli Lumban Toruan, dkk, *Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal kajian ilmu sosial, politik dan hukum, vol. 1, No. 4 Tahun 2024.

²² Eliza Della Kanaya, *Kebijakan Formulasi Pemulihan Nama Baik Korban Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Penagihan Piutang Oleh Desck Collector Fintech P2P Lending Ilegal Di Indonesia*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2 Tahun 2021.

keikhlasan menerima kenyataan, dan perubahan dalam penilaian sosial. Aspek-aspek yang mendasari perubahan ini antara lain pandangan hidup di masa lalu, refleksi terhadap kasus korupsi yang dialami, pengalaman hidup di dalam lapas, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, dan strategi coping terhadap stres.²³

Kedelapan, artikel oleh Sarlina Kurniati Tunliu, dkk, “*Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang*”, Penelitian ini membahas bagaimana dukungan sosial dari keluarga berperan penting dalam membentuk resiliensi narapidana selama menjalani masa hukuman. Narapidana sering mengalami tekanan emosional, perasaan terasing, dan penurunan harga diri, sehingga kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi yakni resiliensi menjadi sangat penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga, baik dalam bentuk emosional, moral, maupun material, memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan resiliensi narapidana. Kunjungan langsung, komunikasi yang terjalin dengan baik, serta keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan terbukti membantu narapidana untuk tetap memiliki harapan dan semangat menjalani hukuman. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa semakin kuat dukungan keluarga, maka semakin tinggi pula tingkat resiliensi yang ditunjukkan narapidana.²⁴

Kesembilan, artikel oleh Raisa dan Annastasia Ediaty “*Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga*

²³ Muhammad Fadhlil, Subandi, *Perubahan Makna Hidup Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan X*, *Jurnal psikologi*, vol. 3, No. 2 Tahun 2020.

²⁴ Sarlina Kurniati Tunliu, Diana Aipipidely, dkk, “*Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang*”, *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol.1, No.2, June 2019, pp. 68-82.

Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa narapidana wanita yang mendapatkan dukungan sosial, baik dari keluarga, teman, maupun pihak lapas, cenderung memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi. Resiliensi di sini diartikan sebagai kemampuan untuk bangkit kembali dari tekanan psikologis dan mempertahankan kesehatan mental dalam situasi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara dua variabel tersebut, dengan kontribusi paling besar berasal dari dukungan sosial non-keluarga seperti petugas lapas dan sesama warga binaan. Penelitian ini menekankan pentingnya lingkungan sosial yang suportif dalam mendukung pemulihan psikologis narapidana dan menyarankan agar program pembinaan di lembaga pemasyarakatan melibatkan pendekatan interpersonal yang mengedepankan dukungan dan empati.²⁵

Kesepuluh, artikel oleh Rani Faradiah, Lely Ika Mariyati, dkk “*Dukungan Keluarga dan Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dan tingkat resiliensi pada narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik simple random sampling terhadap 200 narapidana, penelitian ini menggunakan skala dukungan keluarga dan skala resiliensi sebagai instrumen pengumpulan data. Dukungan keluarga memberikan kontribusi sebesar 23,2% terhadap tingkat resiliensi narapidana, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menegaskan

²⁵ Raisa, Annastasia Ediati, “*Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang*”, Jurnal Empati, Agustus 2016, Volume 5(3), 537-542.

pentingnya peran keluarga dalam proses pemulihan mental narapidana dan merekomendasikan agar lembaga pemasyarakatan mendorong keterlibatan aktif keluarga dalam pembinaan warga binaan.²⁶

Berbagai penelitian yang dikaji menunjukkan adanya benang merah yang kuat terkait persoalan stigma dan upaya pemulihan individu pasca keterlibatan dalam permasalahan hukum. Secara umum, seluruh kajian sepakat bahwa proses hukum, baik yang berakhir dengan pembebasan, pemidanaan, maupun situasi sebagai korban, sering kali menimbulkan dampak lanjutan berupa kerugian non-materiil seperti tercemarnya nama baik, tekanan psikologis, penurunan harga diri, serta hambatan dalam relasi sosial. Stigma negative dari masyarakat menjadi persoalan utama yang sulit dihilangkan meskipun telah terdapat putusan hukum atau mekanisme pemulihan secara formal.

Persamaan lainnya terletak pada tujuan utama penelitian, yakni mendorong pemulihan martabat dan hak individu secara menyeluruh. Pemulihan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pengembalian hak secara hukum, tetapi juga sebagai proses pemulihan sosial dan psikologis agar individu dapat Kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa tanpa pemulihan yang komprehensif, individu tetap berada dalam posisi rentan meskipun secara hukum telah dinyatakan bebas atau telah menyelesaikan masa pidananya.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan fokus kajian. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek normatif dan yuridis

²⁶ Rani Faradiah, Lely Ika Mariyati, dkk, Dukungan Keluarga dan Resiliensi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, Jurnal PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi, Vol. 3, 2021.

dengan membahas dasar hukum, prosedur rehabilitasi, serta bentuk-bentuk pemulihan nama baik seperti ganti rugi, rehabilitasi, klarifikasi publik, dan penghapusan konten yang merugikan. Pendekatan ini menyoroti peran Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi individu, sekaligus mengungkap adanya keterbatasan regulasi dan lemahnya implementasi pemulihan secara teknis. Disisi lain, sejumlah penelitian lebih menekankan aspek psikologis dan sosial dengan mengkaji bagaimana individu menghadapi stigma melalui proses penyesuaian diri, pembentukan konsep diri, perubahan makna hidup, serta penguatan resiliensi. Dalam kajian ini, pemulihan dipandang sebagai proses internal yang berlangsung secara bertahap dan sangat dipengaruhi oleh dukungan social dari keluarga, lingkungan, komunitas, maupun institusi pelayan masyarakat. Dukungan social terbukti berperan signifikan dalam membantu individu mengatasi tekanan emosional, membangun Kembali kepercayaan diri, dan menumbuhkan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Perbedaan juga tampak pada subjek yang dikaji, mulai dari individu yang dinyatakan tidak bersalah, korban pencemaran nama baik, hingga narapidana dan mantan narapidana. Meskipun latar belakang subjek berbeda, keseluruhan penelitian memperlihatkan bahwa stigma sosial tetap menjadi tantangan utama yang menghambat proses reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan nama baik dan pemulihan psikologis tidak dapat bergantung pada satu pendekatan semata.

Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut mengindikasikan bahwa pemulihan pasca permasalahan hukum merupakan proses multidimensional yang

menuntut sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial psikologis. Pemulihan yuridis tanpa dukungan sosial cenderung tidak efektif menghapus stigma, sementara pemulihan psikologis tanpa jaminan keadilan hukum berpotensi menempatkan individu dalam ketidakpastian hak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan praktik pemulihan yang bersifat holistik agar pemulihan nama baik dan martabat individu dapat tercapai secara optimal.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada strategi naratif narapidana kasus korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam menghadapi stigma sosial dan membangun kembali nama baik mereka. Fenomena tersebut merupakan bentuk reaksi psikososial terhadap tekanan sosial dan ancaman terhadap identitas diri.

Untuk memahami dinamika ini, penelitian menggabungkan dua perspektif teori utama, yaitu Teori Pertarungan atau Pelarian (*Fight or Flight Theory*) yang menyoroti reaksi manusia terhadap ancaman, dan Konsep Resiliensi yang menjelaskan kemampuan individu untuk beradaptasi dan pulih dari tekanan atau pengalaman traumatis. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana narapidana korupsi menghadapi, menyesuaikan diri, serta membangun ulang identitas dan reputasi sosialnya.

1. Teori Pertarungan atau Pelarian (*Fight or Flight Theory*)

Teori *fight or flight* pertama kali diperkenalkan oleh Walter B. Cannon (1915), yang menjelaskan bahwa ketika individu menghadapi ancaman atau tekanan, tubuh akan memberikan dua bentuk respons utama: melawan (*fight*) atau melarikan diri (*flight*).²⁷ Respons ini dikendalikan oleh sistem saraf simpatik yang memicu reaksi fisiologis dan emosional untuk mempertahankan diri.

Dalam konteks psikososial, teori ini telah mengalami perkembangan pemaknaan. Ia tidak lagi hanya menjelaskan reaksi biologis terhadap ancaman fisik, melainkan juga respon kognitif dan emosional terhadap ancaman sosial, seperti kehilangan status, kehormatan, atau penerimaan sosial.²⁸ Dengan demikian, *fight* dapat dimaknai sebagai upaya aktif untuk menghadapi dan menantang sumber tekanan, sedangkan *flight* dimaknai sebagai usaha menghindari, menarik diri, atau menyesuaikan diri secara pasif terhadap tekanan.²⁹

Bagi narapidana korupsi, ancaman yang dihadapi bukan berupa ancaman fisik, melainkan ancaman terhadap identitas moral dan sosial mereka akibat stigma yang melekat. Dalam situasi ini, “pertarungan” diwujudkan dalam bentuk upaya merebut kembali makna diri dan nama baik melalui narasi

²⁷ Walter B. Cannon, *Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage* (New York: D. Appleton & Company, 1915).

²⁸ Ghasemi, Farshad, David Q. Beversdorf, dan Keith C. Herman. "Stres dan respons stres: Tinjauan pustaka naratif dari mekanisme fisiologis hingga pendekatan intervensi." *Jurnal Psikologi Lingkar Pasifik* 18 (2024): 18344909241289222.

²⁹ Sapolsky, Robert M. *Mengapa zebra tidak terkena tukak lambung: Panduan ternama untuk stres, penyakit terkait stres, dan cara mengatasinya*. Buku saku Holt, 2004.

perubahan dan penyesalan, sedangkan “pelarian” tampak dalam bentuk penghindaran pembicaraan tentang masa lalu, penarikan diri, atau diam terhadap stigma.³⁰

2. Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Identitas Narapidana Korupsi

Menurut Erving Goffman (1963), stigma merupakan atribut yang mendiskreditkan individu dan mengubah identitas sosialnya dari yang dianggap utuh menjadi tercela.³¹ Stigma terhadap narapidana korupsi di Indonesia muncul karena korupsi dipersepsikan bukan hanya sebagai kejahatan ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran moral dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan publik. Akibatnya, setelah menjalani masa hukuman, narapidana korupsi seringkali tetap dipandang negatif oleh masyarakat.³²

Stigma ini berfungsi sebagai ancaman sosial yang memengaruhi konsep diri, harga diri, dan kemampuan individu untuk diterima kembali dalam komunitas sosial. Bagi narapidana, stigma menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan dan memunculkan dilema: apakah mereka akan melawan stigma melalui narasi diri positif (*fight*), atau menghindarinya melalui penarikan diri (*flight*).³³

³⁰ Lazarus, Richard S. *Stres dan emosi: Sebuah sintesis baru*. Penerbit Springer, 2006.

³¹ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (New Jersey: Prentice-Hall, 1963).

³² Link, Bruce G., dan Jo C. Phelan. "Konseptualisasi Stigma." *Tinjauan Tahunan Sosiologi* 27, no. 1 (2001): 363-385.

³³ Major, Brenda, and Laurie T. O'Brien. "The social psychology of stigma." *Annu. Rev. Psychol.* 56 (2005): 393-421.

3. Konsep Resiliensi

Konsep resiliensi mengacu pada kemampuan individu untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari kesulitan atau pengalaman traumatis.³⁴ Menurut Ann Masten (2001), resiliensi bukanlah kualitas bawaan, melainkan proses dinamis yang memungkinkan individu mengatasi tekanan secara konstruktif.³⁵

Dalam konteks narapidana korupsi, resiliensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan membangun makna positif di tengah stigma dan kehilangan reputasi sosial. Resiliensi memungkinkan individu untuk tidak sekedar bertahan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru dan menyusun narasi yang menegaskan perubahan serta pertumbuhan moral.

Konsep resiliensi melengkapi teori *fight or flight* karena jika teori Cannon menjelaskan reaksi awal terhadap tekanan, maka resiliensi menjelaskan tahapan lanjutan: bagaimana individu mengelola tekanan tersebut secara konstruktif dan berkelanjutan.³⁶

4. Strategi Naratif sebagai Wujud Pertarungan, Pelarian, dan Resiliensi

Pendekatan naratif menjelaskan bahwa manusia membangun identitas diri melalui cerita yang mereka ciptakan tentang bagaimana pengalaman hidupnya.³⁷ Dalam konteks ini, narasi menjadi sarana untuk menyusun kembali makna diri setelah individu mengalami penurunan status sosial atau kehilangan reputasi.

³⁴ Masten, Ann S. "Sihir biasa: Proses ketahanan dalam perkembangan." *Psikolog Amerika* 56, no. 3 (2001): 227.

³⁵ Ibid.

³⁶ Rutter, Michael. "Ketahanan sebagai konsep yang dinamis." *Perkembangan dan psikopatologi* 24, no. 2 (2012): 335-344.

³⁷ Ibid.

a. Strategi Pertarungan (*Fight Narrative*)

Strategi ini menggambarkan upaya aktif narapidana untuk melawan stigma dengan menegaskan narasi perubahan diri, penyesalan, dan kontribusi positif. Mereka mencoba menampilkan versi diri yang lebih bertanggung jawab dan bermoral.³⁸ Narasi ini menunjukkan bentuk resiliensi aktif, dimana individu tidak hanya bereaksi terhadap tekanan, tetapi juga memanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kembali identitas moral sosialnya.³⁹

b. Strategi Pelarian (*Flight Narrative*)

Strategi ini mencerminkan bentuk penghindaran sosial atau diam terhadap stigma. Narapidana yang memilih strategi ini biasanya menjaga jarak, tidak mau mengulang pembicaraan tentang kasusnya, atau menghindari interaksi dengan pihak luar.⁴⁰ Namun, strategi ini juga dapat dimaknai sebagai resiliensi pasif, dimana individu berusaha menjaga keseimbangan emosional dengan menghindari konflik langsung yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya.⁴¹

Dengan demikian, strategi naratif dapat dipahami sebagai ruang ekspresi resiliensi melalui pertarungan maupun pelarian, keduanya menunjukkan cara individu beradaptasi terhadap tekanan sosial yang berat.

³⁸ McAdams, Dan P. *Kisah-kisah yang kita jalani: Mitos-mitos pribadi dan pembentukan diri*. Guilford Press, 1993.

³⁹ Riessman, Catherine Kohler. "Melakukan analisis naratif." *Analisis Naratif*. London: Sage Publications (1993).

⁴⁰ Gergen Kenneth, J. *Diri yang jenuh: Dilema identitas dalam kehidupan kontemporer*. New York: Basic Books, 1991.

⁴¹ Corrigan, Patrick W., dan Amy C. Watson. "Memahami dampak stigma pada orang dengan penyakit mental." *World psychiatry* 1, no. 1 (2002): 16.

5. Integrasi Teori *Fight or Flight* dengan Konsep Resiliensi

Integrasi antara teori *fight or flight* dan konsep resiliensi memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika naratif narapidana korupsi.

Tabel 1.1 Integrasi Teori Fight Or Flight dengan Resiliensi

Aspek	Teori <i>Fight or Flight</i>	Konsep Resiliensi	Manifestasi dalam Strategi Naratif
Fokus utama	Respons terhadap ancaman	Adaptasi terhadap tekanan	Rekonstruksi identitas diri
Orientasi waktu	Jangka pendek (reaksi awal)	Jangka panjang (proses pemulihan)	Proses kontinu pembentukan makna
Bentuk perilaku	Melawan atau menghindar	Bertahan dan berkembang	Narasi perubahan atau penghindaran
Tujuan psikologis	Mengurangi ancaman	Meningkatkan kesejahteraan batin	Membangun kembali nama baik

Dalam konteks penelitian ini, narapidana yang memilih strategi pertarungan tampak menunjukkan bentuk resiliensi transformasional, yaitu kemampuan untuk mengolah tekanan menjadi peluang pengembangan diri dan peningkatan kapasitas personal. Sementara itu, narapidana yang cenderung mengambil strategi pelarian memperlihatkan resiliensi protektif, yakni upaya mempertahankan keseimbangan psikologis melalui pembatasan keterlibatan emosional maupun sosial sebagai cara melindungi diri dari tekanan lingkungan.⁴²

⁴² Mulyati, Rina. "Resiliensi Remaja "High-Risk" Ditinjau Dari Faktor Protektif." *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 14, no. 1 (2009): 83-96.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, yang dilakukan melalui prosedur yang sistematis.⁴³ Rancangan yang ada di dalamnya memuat baik subjek maupun objek yang diteliti, prosedur pengumpulan data beserta teknik pengumpulannya serta analisis yang digunakan untuk mengintegrasikan sebuah masalah.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terkait realitas melalui proses berpikir secara induktif.⁴⁴ Pelaksanaan penelitian melibatkan peneliti untuk aktif terlibat dalam kondisi alami objek penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali lebih dalam terkait dengan keadaan warga binaan tindak pidana korupsi yang mengalami stigma sosial tinggi. Hal tersebut didapatkan oleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan melibatkan warga binaan dan staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dari narasumber, dan menganalisisnya serta fokus pada makna yang tersampaikan oleh individu.⁴⁵ Penelitian ini dikaitkan pada bagaimana peneliti memberikan pemahaman pada objek yang diteliti. Williams pada tahun 2008 menyebutkan bahwa penelitian kualitatif memiliki tiga hal

⁴³ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia 2010).

⁴⁴ Miza Nina Adlini et al., "*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*", *Edumaspul* 6, No. 1 (2022): 974-80.

⁴⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitriatun; Sukarno Annisya (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

pokok, yang meliputi: 1. Pandangan terkait realitas, adanya hubungan antara peneliti, hal yang diteliti, dan nilai yang berperan dalam penelitian, 2. Karakteristik penelitian itu sendiri, 3. Proses yang dilakukan.⁴⁶

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan menelaah fenomena yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Peneliti melakukan analisis data dengan menekankan penjelasan yang diberikan oleh informan dan melakukan pemahaman terhadap respons, baik dari warga binaan maupun staf lapas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jalan Taman Siswa No. 6, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih atas beberapa alasan. Pertama, rekomendasi oleh salah satu staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, bahwa resiliensi yang dialami oleh warga binaan berbeda-beda dan stigma buruk terhadap narapidana korupsi sangat tinggi. sehingga narapidana tindak pidana korupsi sangat membutuhkan pendampingan konseling, sehingga tepat untuk dilakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Kedua, lokasi tersebut juga dipilih karena letaknya yang strategis dan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti.

⁴⁶ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, LP2M UST Jogja, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).

3. Informan dan Teknik Penentuan Informan

Objek dalam penelitian ini adalah warga binaan yang berfokus pada resiliensi warga binaan dalam menghadapi masalah dan stigma buruk yang dialami oleh narapidana korupsi serta bagaimana strategi naratif yang digunakan warga binaan untuk menghadapi stigma sosial.

Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposif sampling* atau dikatakan sebagai teknik penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.⁴⁷ Penentuan informan pada warga binaan didasarkan pada perilaku dan pola kehidupan, terkait kegiatan sehari-hari.

Penentuan ini dilakukan dengan cara pemilihan yang dilakukan dengan Wali Pemasyarakatan. Penentuan tersebut dilakukan dengan berdasarkan diskusi dengan peneliti terkait penggalian data yang dilakukan. Informan dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu petugas pemasyarakatan dan warga binaan tindak pidana korupsi yang mengalami resiliensi rendah serta mendapatkan stigma sosial di lingkungannya. Proses pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan fokus penelitian, termasuk jabatan sebelum masuk lapas, tingkat pendidikan, serta keterlibatan informan dalam kegiatan pembinaan. Setelah informan ditentukan, petugas Tamping (Tahanan Pendamping) mencatat data warga binaan yang akan di bon, kemudian proses tersebut disahkan melalui tanda tangan KPLP sebagai bentuk persetujuan resmi. Selanjutnya, warga binaan diarahkan menuju ruang

⁴⁷ Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Bimaswat untuk menjalani sesi wawancara secara terstruktur sesuai kebutuhan penelitian. Setelah proses wawancara selesai, warga binaan dikembalikan ke blok masing-masing atau diperbolehkan melanjutkan kegiatan pembinaan lainnya sesuai jadwal yang berlaku. Prosedur ini memastikan bahwa alur perizinan berjalan tertib, terdokumentasi, dan tetap mematuhi ketentuan keamanan lapas.⁴⁸ Penentuan informan dengan melihat:

- a. Jabatan.
- b. Tingkat Pendidikan.
- c. Warga Binaan yang mampu menerima diri pasca vonis.
- d. Warga Binaan yang Mampu Menarasikan Hidupnya Selama di Dalam Penjara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui tindakan *observing*, *interviewing* dan juga *documenting* sebagai langkah primer:

- a. Observasi

Pengamatan ditempat penelitian yang berkaitan dengan subjek dan lingkungannya, dilakukan dengan mengamati kondisi lingkungan dan keadaan pada objek penelitian.⁴⁹ Fokus observasi lebih menekankan pengamatan pada warga binaan tindak pidana korupsi yang mengalami stigma sosial tinggi, pola komunikasi yang dilakukan baik dengan sesama warga binaan maupun petugas, serta kegiatan warga binaan.

⁴⁸ Hasil Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta pada Tanggal 5 Januari 2025.

⁴⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Peneliti melakukan pengamatan yang sekaligus dilakukan pada hari dimana peneliti telah melakukan wawancara dengan informan. Pengamatan dilakukan saat berjalan memasuki maupun keluar dari ruang petugas pemasyarakatan serta di depan hunian atau kamar tempat warga binaan tindak pidana korupsi.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan dengan menggunakan prdoman wawancara. Proses pengumpulan data saat wawancara tersebut dilakukan dengan cara mencatat dengan menggunakan laptop dan sebagian dilakukan dengan merekam menggunakan *Handphone* (HP).

Wawancara dengan warga binaan dilakukan setelah mendapatkan izin, dimana setelah pengajuan warga binaan sebagai informan, maka informan dipanggil dengan adanya izin dari petugas. Wawancara dilakukan dengan selalu menjaga privasi informan dengan menyamarkan nama warga binaan. Adanya keterbatasan waktu dan adanya harapan keterbukaan dari informan warga binaan, peneliti melakukan wawancara dengan bahasa yang tidak terlalu formal dan bersikap santai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi didapatkan peneliti melalui dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang berupa catatan peristiwa yang berbentuk tulisan dan angka. Dokumen tersebut meliputi, data jumlah dan jenis kasus pelanggaran yang dilakukan warga binaan tindak pidana korupsi.

Metode ini membantu peneliti untuk melihat data yang tercatat baik dari angka dan juga catatan kasus pelanggaran warga binaan.

d. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para informan utama penelitian, yaitu Kepala Kesatuan dan Pengamanan (Ka. KPLP), Petugas Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT), staf seksi kegiatan kerja, pembimbing kepribadian, serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen internal Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang memuat informasi mengenai jumlah dan karakteristik warga binaan, serta berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan tahunan, arsip lembaga, serta literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Semua sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih komprehensif terhadap dinamika sosial yang terjadi di dalam Lapas.

5. Validasi Data

Tingkat keabsahan data dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dapat dilakukan melalui data-data yang sebelumnya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dicocokkan serta dibandingkan antara satu dengan yang lainnya hingga mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan fenomena yang sedang diamati.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda namun masih dalam lingkup yang sama.⁵¹

Triangulasi sumber data dilakukan dengan pemilihan sumber data yang sesuai.⁵² Peneliti melakukan triangulasi sumber yang ada pada hasil wawancara. Hal tersebut dilakukan dengan menanyakan ulang hasil wawancara informan terhadap informan yang lainnya.

Triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji keandalan data dengan memverifikasi kebenarannya melalui berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama.⁵³ Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

⁵⁰ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁵² Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, Cetakan Pertama (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).

⁵³ Muhammad Wahyu Ilhami Wiyanda Vera Nurfajriani, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," 12 November 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

- a. Membandingkan hasil wawancara dari informan petugas lapas dengan informan warga binaan.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan informan warga binaan dengan data Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi lapas.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan observasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yaitu:

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, tujuan dari bab II ini untuk menggambarkan tentang kondisi dan data-data terkait dengan lembaga. Kondisi dan data-data yang dimaksud berisi penjelasan tentang sejarah lembaga, letak geografis, visi dan misi lembaga, tujuan dan fungsi lembaga, struktur lembaga, sarana dan prasarana, Kepegawaian, Pendanaan, Pembinaan Perilaku, dan Karakteristik Warga Binaan.

Bab III berisi tentang bagaimana narapidana kasus korupsi menanggapi realitas kehidupan di balik jeruji besi, mulai dari fase awal penyesuaian diri, munculnya perasaan malu dan penyesalan, hingga proses membangun kekuatan

internal untuk bertahan dan bangkit.

Bab IV ini berisi tentang Strategi naratif untuk pemulihan nama baik, dukungan sosial dari keluarga, teman, atau petugas lapas, Faktor pendukung dan penghambat.

Bab V berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan bahwa upaya mengembalikan nama baik melalui strategi naratif narapidana kasus korupsi dalam menghadapi stigma sosial merupakan proses reflektif dan transformatif, yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Berdasarkan penelitian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, narapidana kasus korupsi tidak hanya berjuang untuk bertahan secara emosional di tengah tekanan stigma, tetapi juga membangun narasi baru tentang diri mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap label negatif masyarakat.

Pada fase awal masuk penjara, narapidana kasus korupsi mengalami krisis identitas yang kuat, rasa malu, penyesalan, dan kehilangan kepercayaan diri akibat perubahan status sosial. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menata ulang citra diri melalui proses refleksi dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan positif, seperti pembinaan keagamaan, penulisan buku, dan partisipasi dalam aktivitas sosial di Lapas. Narasi yang dibangun menjadi sarana untuk menata kembali makna hidup dan membingkai ulang pengalaman di dalam penjara sebagai bagian dari perjalanan moral menuju pemulihan diri.

Strategi naratif menjadi mekanisme utama dalam pemulihan identitas dan pengembalian nama baik. Melalui narasi penyesalan, refleksi moral, serta karya produktif, narapidana berupaya membangun kembali makna hidup dan memperlihatkan perubahan perilaku sebagai bukti dari proses pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan di Lapas Kelas IIA

Yogyakarta tidak semata-mata menjadi wadah hukuman, melainkan juga ruang transformasi sosial dan spiritual. Upaya melawan stigma sosial melalui perilaku reflektif dan produktif menunjukkan bahwa masa pembinaan di Lapas dapat menjadi titik balik untuk pemulihan harga diri dan peneguhan kembali martabat kemanusiaan.

Selama melakukan penelitian di dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan fokus pada strategi naratif narapidana korupsi dalam membangun kembali nama baik, peneliti memperoleh pelajaran penting bahwa realitas kehidupan warga binaan jauh lebih kompleks daripada stigma yang dilekatkan oleh masyarakat. Peneliti belajar bahwa di balik label “Narapidana Korupsi” terdapat individu yang terus berproses menghadapi rasa malu, penyesalan, dan kehilangan identitas, sekaligus berupaya mencari makna baru melalui refleksi diri, aktivitas produktif, dan relasi sosial di dalam lapas. Interaksi langsung dengan informan juga mengajarkan pentingnya empati, kesabaran, serta etika penelitian, karena membangun kepercayaan menjadi kunci agar narasi personal dapat terungkap secara jujur. Selain itu, peneliti memahami bahwa lapas tidak semata-mata menjadi ruang hukuman, tetapi juga arena pembelajaran sosial dan spiritual, di mana narasi hidup digunakan sebagai strategi untuk bertahan, memulihkan martabat, dan menegosiasikan kembali identitas diri di tengah keterbatasan dan stigma sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “*Mengembalikan Nama Baik: Strategi Naratif Narapidana Kasus Korupsi dalam Menghadapi Stigma Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*”, maka penulis memberikan beberapa saran baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian ilmu sosial, khususnya bidang pekerjaan sosial dengan memperlihatkan bahwa teori resiliensi dan fight or flight dapat diaplikasikan untuk memahami proses adaptasi dan pemulihan identitas pada narapidana kasus korupsi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi tidak hanya muncul dari kekuatan individu, tetapi juga dari konteks sosial seperti dukungan keluarga, hubungan dengan sesama warga binaan, dan sistem pembinaan di Lapas.

Kedepannya, penelitian serupa dapat dikembangkan dengan memperluas fokus pada bentuk-bentuk narasi lain seperti narasi spiritual, moral, atau eksistensial, serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang kasus dan jenis lembaga pemasyarakatan.

2. Implikasi Praktis

a. Lembaga Pemasyarakatan

Lapas Kelas IIA Yogyakarta dapat memperkuat program pembinaan yang bersifat reflektif dan naratif, seperti pelatihan menulis, konseling naratif, atau forum diskusi moral. Kegiatan tersebut dapat membantu warga binaan, khususnya narapidana kasus korupsi untuk menyalurkan perasaan bersalah

dan membangun makna baru yang positif terhadap pengalaman hukum yang dijalani.

b. Pekerja Sosial dan Pembina Lapas

Diperlukan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis kekuatan (*Strength based approach*) dalam mendampingi narapidana. Pendekatan ini menekankan potensi individu untuk bangkit dan memperbaiki diri, bukan semata-mata pada aspek hukuman.

c. Keluarga Narapidana

Keluarga memiliki peran sentral sebagai sumber dukungan emosional dan moral. Sikap penerimaan dari keluarga terbukti mampu menumbuhkan semangat narapidana untuk bertahan, beradaptasi, dan membangun kembali identitas diri.

d. Masyarakat

Diperlukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap mantan narapidana khususnya narapidana kasus korupsi, agar mereka diberi ruang untuk kembali berkontribusi secara sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa proses pembinaan di Lapas bukan akhir dari nilai kemanusiaan seseorang, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Ambarwati, D. (2017). Lapas, narapidana dan ekonomi: Tinjauan pembinaan ekonomi produktif di lembaga pemasyarakatan Kota Metro Lampung. *Realitas Islam: Jurnal Kajian Islam dan Sosial*, 3(2), 107-121.
- Andriyani, J. (2019). Strategi coping stres dalam mengatasi problema psikologis. *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 37-55.
- Anggraini, D., Hadiati, T., & Sarjana, W. (2019). Perbedaan tingkat stres dan resiliensi narapidana baru masuk dan narapidana yang akan bebas. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 8(1), 148-160.
- Arjun, A., Titahelu, J. A. S., & Tuhumury, C. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pemulihan nama baik bagi terdakwa yang dinyatakan bebas. *TAT OHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(7), 693-701.
- Arvian. (2025). Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- Astika. (2025). Wawancara dengan petugas pelayanan dan dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- Cannon, W. B. (1925). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage. D. Appleton.
- Corrigan, P. W., & Watson, A. C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. *World Psychiatry*, 1(1), 16-20.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage.
- Davison, G. C., Neale, J. M., & Kring, A. M. (2006). Psikologi abnormal. RajaGrafindo Persada.
- Edgemon, T. G., & Clay-Warner, J. (2019). Inmate mental health and the pains of imprisonment. *Society and Mental Health*, 9(1), 33-50.
- Enggarati, L., Santoso, M. B., & Hidayat, E. N. (2024). Urgensi intervensi krisis pada narapidana remaja dengan gangguan mental. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(1), 66-73.
- Fadhli, M., & Subandi, S. (2020). Perubahan makna hidup warga binaan tindak pidana korupsi. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 3(2), 91-104.

- Fanani, A. N. (2022). Bentuk coping stress mahasiswa Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri angkatan 2016 (Skripsi). IAIN Kediri.
- Faradiah, R., Mariyati, L. I., & Maryami, E. W. (2021). Dukungan keluarga dan resiliensi pada narapidana. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 3, 133-142.
- Fausiah, F., & Widury, J. (2005). Psikologi abnormal klinis dewasa. Universitas Indonesia.
- Feoh, F. T. (2020). Studi fenomenologi stres narapidana perempuan pelaku human trafficking. *Jurnal Ilmiah Nursing*, 11(3), 7-16.
- Gergen, K. J. (1991). *The saturated self*. Basic Books.
- Ghasemi, F., Beversdorf, D. Q., & Herman, K. C. (2024). Stress and stress responses. *Pacific Rim Psychology*, 18, 1-15.
- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon & Schuster.
- Hardani, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Auliya, N. H., et al. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu.
- Haryoko, S. (2020). Analisis data penelitian kualitatif. Sapto Haryoko.
- Hidayati, L. N., & Harsono, M. (2021). Tinjauan literatur stres dalam organisasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 18(1), 20-30.
- Karame, V., Molintao, W., & Makawimbang, S. (2022). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat stres warga binaan. *E-Prosiding Seminar Nasional*, 1(2), 441-455.
- Kristianto, J., & MM, M. (2022). Pengertian korupsi. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, 161.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology*, 27, 363-385.
- Major, B., & O'Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. *Annual Review of Psychology*, 56, 393-421.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic. *American Psychologist*, 56(3), 227-238.

- McAdams, D. P. (1993). *The stories we live by*. Guilford Press.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.
- Raisa, R., & Ediati, A. (2016). Dukungan sosial dan resiliensi narapidana. *Jurnal Empati*, 5(3), 537-542.
- Revenson, T. A., & Singer, J. E. (2005). *Handbook of health psychology*. Routledge.
- Riessman, C. K. (1993). *Narrative analysis*. Sage.
- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335-344.
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers*. Holt.
- Shobrianto, A., & Warsono, W. (2023). Konsep diri mantan narapidana. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(2), 429-443.
- Sudiono Hi, D. (2020). *Tinjauan yuridis fungsi pencegahan korupsi pada KPK (Disertasi)*. STIH IBLAM.
- Suryana, S. (2010). *Metodologi penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Taufan. (2025). *Wawancara dengan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Yogyakarta*.
- Toule, E. R. (2013). Ancaman pidana mati dalam UU Tipikor. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103-110.
- Tunliu, S. K., Aipipidely, D., & Ratu, F. (2019). Dukungan sosial keluarga dan resiliensi narapidana. *Journal of Health and Behavioral Science*, 1(2), 68-82.
- Yoga. (2025). *Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*.